

## ABSTRAK

### REFORMULASI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI

Helia Shanti Putri Wulandari (2210622030), Handar Subhandi Bakhtiar,  
Beniharmoni Harefa

Sistem peradilan pidana saat ini cenderung bersifat punitif, oleh karenanya dibutuhkan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penjatuhan hukuman bagi penyalah guna narkoba melalui rehabilitasi yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* dapat ditetapkan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui urgensi dari reformulasi penerapan *restorative justice* terhadap penyalah guna narkoba melalui rehabilitasi dan memahami reformulasi penerapan *restorative justice* terhadap penyalah guna narkoba melalui rehabilitasi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dalam pembahasan ini adalah urgensi diterapkannya rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* didasarkan pada beberapa faktor yang mendesak, baik dari perspektif kesehatan, sosial, maupun kebijakan kriminal. Reformulasi terhadap ancaman pidana pada pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah sangat krusial untuk dilakukan, hal ini akan mendorong konsistensi dan integritas dalam penerapan hukum terhadap penyalah guna narkoba serta menjadikan satu standar hukum yang sama, karena semua penyalah guna narkoba akan mendapat kesempatan untuk rehabilitasi yang lebih terstruktur dan terjamin. Beberapa langkah strategis perlu diambil untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan ini, pertama melakukan reformulasi Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk menutup celah penerapan pidana penjara yang tidak konsisten. Kedua, mengintegrasikan pendekatan *restorative justice* dalam semua tingkatan pemeriksaan hukum, bukan hanya sebagai bagian dari peraturan internal seperti Perkap, Perja, atau PERMA. Ketiga melakukan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk menguji konstitusionalitas ancaman pidana penjara bagi penyalah guna narkoba.

**Kata Kunci:** Reformulasi, Restorative Justice, Penyalah Guna.

## **ABSTRACT**

### **REFORMULATION OF THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TOWARDS NARCOTICS ABUSERS THROUGH REHABILITATION**

Helia Shanti Putri Wulandari (2210622030), Handar Subhandi Bakhtiar,  
Beniharmoni Harefa

*The current criminal justice system tends to be punitive in nature, necessitating strategic criminal policy reforms, particularly in handling cases of narcotics abuse. The imposition of rehabilitation for narcotics users, implemented through a restorative justice approach, can optimize the resolution of narcotics abuse cases. This study aims to explore the urgency of reformulating the application of restorative justice for narcotics users through rehabilitation and to analyze how restorative justice can be integrated into the law enforcement system in Indonesia. This research employs a normative juridical approach. The findings emphasize the pressing need to implement rehabilitation for narcotics users using restorative justice, driven by health, social, and criminal policy considerations. Reformulating the criminal sanctions in Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics is crucial to ensure consistency and integrity in the application of law, creating a unified legal standard where all narcotics users have a structured and guaranteed opportunity for rehabilitation. Several strategic steps are recommended to optimize the implementation of this policy. First, reformulating Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics to eliminate inconsistencies in the application of imprisonment. Second, integrating the restorative justice approach at all stages of legal proceedings, not merely as part of internal regulations such as Perkap, Perja, or PERMA. Third, conducting a judicial review of Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics to examine the constitutionality of imprisonment as a sanction for narcotics users.*

**Keywords:** *Reformulation, Restorative Justice, Narcotics Abusers.*